

PPKN KELAS XI

Multiple Choice

Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

- ___ 1. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah...
- a. DPR
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. Komisi Yudisial
 - d. Mahkamah Agung
 - e. Presiden
- ___ 2. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah...
- a. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
 - b. Mengucilkan para pelaku korupsi
 - c. Mengawasi para penegak hukum
 - d. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
 - e. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi
- ___ 3. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah...
- a. Komisi Yudisial
 - b. Mahkamah Agung
 - c. Mahkamah Konstitusi
 - d. Hakim Agung
 - e. Kejaksaan Agung
- ___ 4. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah...
- a. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
 - b. Menguji UU terhadap UUD
 - c. Memutuskan pembubaran partai politik
 - d. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
 - e. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden

- ___ 5. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...
- Tata usaha negara
 - Negeri
 - Agama
 - Tinggi
 - Militer
- ___ 6. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirilah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk
- Membentuk seluruh partai politik
 - menguji undang -undang terhadap UUD
 - Mengangkat memberhentikan hakim
 - Memutus peradilan tingkat kasasi
 - Menguji secara material UUD 1945
- ___ 7. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut....
- Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
 - Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
 - Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
 - Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
 - Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
- ___ 8. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang....
- pelaksanaan hukum
 - pengaawasan
 - pengamanan
 - penberi nasehat
 - peradilan
- ___ 9. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
- alinea 4 pembukaan
 - pembukaan
 - aturan tambahan
 - batang tubuh
 - aturan peralihan

- ___ 10. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hukum bersifat....
- universal
 - sementara
 - fleksibel
 - mendesak
 - mengikat
- ___ 11. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah ...
- Komisi Yudisial
 - Mahkamah Agung
 - Pengadilan tinggi
 - Mahkamah Konstitusi
 - Mahkamah militer
- ___ 12. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
- Komisi Yudisial
 - Mahkamah Agung
 - Pengadilan negeri
 - Mahkamah Konstitusi
 - Pengadilan militer
- ___ 13. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya...
- Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama
 - Menataati peraturan yang berlaku
 - Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik
 - Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah
 - Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama
- ___ 14. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara ...
- mempunyai hak dan kewajiban
 - wajib taat dan patuh terhadap hukum
 - bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
 - wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
 - mendapat perlindungan hukum

- ___ 15. Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah...
- Undang-Undang
 - Ketetapan MPR
 - UUD 1945
 - peraturan pemerintah
 - peraturan pemerintah pengganti UU
- ___ 16. Yang bukan merupakan bagian dari 4 pilar kebangsaan dalam
- Pancasila
 - UUD 1945
 - NKRI
 - Bhineka Tunggal Ika
 - Demokrasi
- ___ 17. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden meminta pertimbangan dari ...
- Mahkamah Agung
 - Pengadilan Banding
 - Mahkamah Konstitusi
 - Menteri Hukum dan HAM
 - Dewan Perwakilan Rakyat
- ___ 18. Hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan disebut
- hukum traktat
 - yuridprudensi
 - hukum tak tertulis
 - hukum kebiasaan
 - undang-undang
- ___ 19. Adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang merupakan....
- sifat hukum
 - ciri hukum
 - tendensi hukum
 - hukum tertulis
 - hukum traktat
- ___ 20. Definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai kenyataan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh
- Immanuel Kant
 - E. Utrecht
 - Van Apeldoorn
 - J.C.T. Simorangkir
 - Mochtar Kusumaatmadja

- ___ 21. Sifat hukum adalah....
- fleksibel
 - tidak mengikat pada yang tidak mengerti
 - dapat diatur sesuai kebutuhan
 - mengatur dan memaksa
 - tidak menjamin
- ___ 22. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Definisi hukum tersebut disampaikan oleh
- Imanuel Kant
 - E. Utrecht
 - Van Apeldoorn
 - J.C.T. Simorangkir
 - Mochtar Kusumaatmadja
- ___ 23. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan harusnya dipatuhi oleh masyarakat karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Definisi hukum tersebut disampaikan oleh
- Imanuel Kant
 - J.C.T. Simorangkir
 - Van Apeldoorn
 - E. Utrecht
 - Mochtar Kusumaatmadja
- ___ 24. Salah satu ciri dari hukum publik adalah..
- mengutamakan kepentingan individu
 - tidak mengikat pada yang tidak mengerti
 - Gugatan tidak dapat dicabut kembali
 - mengatur hal ikhwal yang khusus
 - tidak menjamin
- ___ 25. Yang bukan merupakan sumber hukum Indonesia adalah..
- UUD
 - KUHAP
 - doktrin
 - traktat
 - keputusan hakim

PPKN KELAS XI
Answer Section**MULTIPLE CHOICE**

- | | |
|------------|--------|
| 1. ANS: D | PTS: 1 |
| 2. ANS: D | PTS: 1 |
| 3. ANS: A | PTS: 1 |
| 4. ANS: E | PTS: 1 |
| 5. ANS: B | PTS: 1 |
| 6. ANS: B | PTS: 1 |
| 7. ANS: B | PTS: 1 |
| 8. ANS: E | PTS: 1 |
| 9. ANS: D | PTS: 1 |
| 10. ANS: E | PTS: 1 |
| 11. ANS: D | PTS: 1 |
| 12. ANS: A | PTS: 1 |
| 13. ANS: B | PTS: 1 |
| 14. ANS: B | PTS: 1 |
| 15. ANS: C | PTS: 1 |
| 16. ANS: E | PTS: 1 |
| 17. ANS: E | PTS: 1 |
| 18. ANS: B | PTS: 1 |
| 19. ANS: B | PTS: 1 |
| 20. ANS: C | PTS: 1 |
| 21. ANS: D | PTS: 1 |
| 22. ANS: E | PTS: 1 |
| 23. ANS: D | PTS: 1 |
| 24. ANS: C | PTS: 1 |
| 25. ANS: B | PTS: 1 |